
Literasi Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba Berdasarkan PSAK No. 45 Di Kota Tarakan

Yohanna Thresia Nainggolan^{a*}, Ferica Christinawati Putri^b, Sulitya Rini Pratiwi^c, Meylin Rahmawati^d, Kartini^e, Rizky Agusriyanti Irna^f

^a Universitas Borneo Tarakan, yohannathresia@borneo.ac.id

^b Universitas Borneo Tarakan, fericacputri@borneo.ac.id

^c Universitas Borneo Tarakan, srpratiwi@borneo.ac.id

^d Universitas Borneo Tarakan, rahmawatimeylin@borneo.ac.id

^e Universitas Borneo Tarakan, kartini96@borneo.ac.id

^f Universitas Borneo Tarakan, rizkyagusriyanti@borneo.ac.id

INFO ARTIKEL

Keywords:

Literacy, Financial Reporting, Non-Profit Organizations, PSAK No. 45.

Kata Kunci:

Literasi, Pelaporan Keuangan, Organisasi Nirlaba, PSAK No. 45

ABSTRACT

The aim of this research is to find out in more depth the level of literacy in financial reporting of non-profit organizations based on PSAK No. 45 in Tarakan City, so that education regarding financial reporting literacy of non-profit organizations based on PSAK No. 45 can be improved both by community actors in non-profit organizations and by universities. Apart from that, it is hoped that this research will increase people's motivation to be able to make effective financial decisions. The target to be achieved is in the form of scientific articles published in both print and electronic form that can be easily accessed by students and the public as well as proceedings at scientific seminars on a local, regional and national scale. The research method used is quantitative descriptive analysis. The population in the study were all churches in Tarakan City, namely 74 churches. Sampling in this research was carried out using a probability sampling technique using cluster random sampling. Data collection was carried out using a questionnaire.

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui secara lebih mendalam mengenai tingkat literasi pelaporan keuangan organisasi nirlaba berdasarkan PSAK No. 45 di Kota Tarakan, sehingga pendidikan mengenai literasi pelaporan keuangan organisasi nirlaba berdasarkan PSAK No. 45 dapat ditingkatkan baik oleh masyarakat pelaku di organisasi nirlaba maupun oleh

universitas. Selain itu, dari penelitian ini diharapkan akan meningkatkan motivasi dari masyarakat untuk dapat mengambil keputusan yang efektif dalam keuangan. Target yang ingin dicapai berupa artikel ilmiah yang dipublikasikan baik dalam bentuk cetak maupun elektronik yang dapat diakses dengan mudah oleh mahasiswa dan masyarakat serta Serta prosiding pada seminar ilmiah baik yang berskala lokal, regional, maupun nasional. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif kuantitatif. Populasi dalam penelitian adalah seluruh gereja yang ada di Kota Tarakan yaitu sebanyak 74 Gereja. Pengambilan sampel dalam penelitian ini dengan teknik probability sampling dengan menggunakan cluster random sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan kuesioner.

PENDAHULUAN

Pelaporan keuangan adalah proses pengaturan, penyediaan, dan penyampaian informasi keuangan untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuan utama dari pelaporan keuangan adalah menyediakan informasi yang bermanfaat untuk pengambilan keputusan. Salah satu alat yang digunakan untuk menyampaikan informasi tersebut adalah laporan keuangan. Hasil dari proses akuntansi, yang berbentuk pertanggungjawaban dalam laporan keuangan, tidak hanya dilakukan oleh organisasi bisnis tetapi juga oleh organisasi nirlaba yang melaporkan laporan keuangannya kepada publik. Menurut PSAK No. 45, perbedaan utama terletak pada cara organisasi memperoleh sumber daya yang diperlukan untuk menjalankan berbagai aktivitas operasionalnya. Organisasi nirlaba mendapatkan sumber daya dari sumbangan anggota dan pihak lain yang memberikan tanpa mengharapkan imbalan. Tujuan utama laporan keuangan organisasi nirlaba adalah menyediakan informasi yang relevan untuk memenuhi kepentingan para penyumbang, anggota organisasi, kreditor, dan pihak lain yang memberikan sumber daya kepada organisasi nirlaba (PSAK nomor 45, 2011).

Indra Bastian (2006) mengungkapkan bahwa organisasi nirlaba yang mengandalkan dana masyarakat mencakup berbagai entitas termasuk lembaga pemerintah pusat, lembaga pemerintah daerah, partai politik, dan LSM (lembaga swadaya masyarakat), serta berbagai lembaga seperti yayasan, lembaga pendidikan dan kesehatan (puskesmas, rumah sakit, dan sekolah), dan tempat ibadah (gereja, vihara, kuil). Organisasi nirlaba merupakan milik masyarakat umum atau masyarakat di wilayah tertentu, oleh karena itu, perkembangan dan kemajuan organisasi sangat bergantung pada kesadaran dan perhatian masyarakat terhadap manajemen organisasi dan praktik akuntansinya. Hal ini juga berlaku untuk organisasi tempat ibadah.

Gereja, sebagai sebuah lembaga nirlaba, memiliki kewajiban dan hak untuk

memberikan laporan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Gereja menggunakan dan mengelola dana yang diperoleh dari masyarakat dalam bentuk persembahan, sumbangan, atau bantuan lainnya sebagai sumber keuangannya. Organisasi perlu transparan terhadap masyarakat umum untuk memperoleh informasi yang akurat, jujur, dan non-diskriminatif, terutama kepada anggota organisasi keagamaan. Informasi tersebut harus dapat diakses oleh siapa pun melalui prosedur yang ditetapkan, sehingga dapat dihindari penyalahgunaan oleh pihak-pihak dengan niat yang tidak baik terhadap organisasi. Kewajiban ini menjadi penting karena pertanggungjawaban organisasi Tempat Ibadah akan signifikan memengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap organisasi itu sendiri (Rahayu et al., 2017). Oleh karena itu, transparansi dan akuntabilitas menjadi faktor kunci bagi gereja untuk menjaga eksistensinya dan mengoptimalkan perannya dalam ranah sosial dan budaya.

Sebagai sebuah entitas nirlaba, Gereja memiliki tanggung jawab dan hak untuk memberikan laporan kepada para pihak yang memiliki kepentingan. Gereja menggunakan dan mengelola dana yang berasal dari masyarakat, baik dalam bentuk persembahan, sumbangan, atau bantuan lainnya, sebagai sumber keuangan. Oleh karena itu, organisasi ini harus bersikap terbuka kepada masyarakat umum dalam menyediakan informasi yang akurat, jujur, dan tidak diskriminatif, terutama kepada anggota organisasi keagamaan tersebut. Informasi tersebut harus dapat diakses oleh siapa pun yang menggunakan mekanisme yang telah ditetapkan, agar tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak dengan niat buruk terhadap organisasi. Ketaatan terhadap tanggung jawab ini penting karena dapat berdampak pada tingkat kepercayaan masyarakat terhadap gereja itu sendiri (Rahayu et al, 2017). Oleh karena itu, transparansi dan akuntabilitas menjadi elemen krusial bagi gereja untuk mempertahankan perannya dan dampaknya dalam konteks sosial dan budaya.

Akuntabilitas dan transparansi memiliki peran penting dalam mengurangi kesenjangan informasi keuangan antara gereja sebagai penerima dana masyarakat dan masyarakat yang menyumbangkan dana tersebut. Untuk mencapai tingkat transparansi dan akuntabilitas yang optimal dalam pengelolaan keuangan gereja, diperlukan kehadiran pengurus gereja yang mempunyai pemahaman yang mumpuni tentang literasi keuangan. Sistem informasi akuntansi yang efektif dan pencatatan keuangan yang teratur, serta penyajian laporan keuangan yang jelas, akan mempermudah pengambilan keputusan terkait pembangunan dan pengelolaan gereja. Pengurus gereja juga perlu aktif dalam menyampaikan informasi yang dapat meningkatkan kredibilitasnya, bahkan jika hal itu hanya sebatas atas dasar kemauan. Meningkatkan literasi keuangan di kalangan pengurus gereja dan menjalankan praktik akuntansi yang tepat adalah langkah yang bisa dilakukan untuk meminimalisir ketidakseimbangan informasi diantara pengurus gereja dan masyarakat sekitarnya. Dalam ranah akuntansi,

keberadaan PSAK No. 45 mengenai akuntansi untuk organisasi nirlaba yang dikeluarkan oleh IAI (Ikatan Akuntan Indonesia) memberikan kerangka kerja yang bermanfaat bagi pengurus gereja untuk meningkatkan tingkat akuntabilitas dan transparansi dalam pencatatan dan pelaporan keuangannya. Namun, disayangkan bahwa masih sedikit pihak yang menyadari keberadaan standar ini sebagai acuan dalam pengelolaan keuangan gereja.

Gereja-gereja di Kota Tarakan berusaha untuk mencapai kinerja yang baik dalam melayani umat, dan dalam upaya tersebut, laporan keuangan memegang peran yang sangat penting bagi kedua pihak, baik internal maupun eksternal gereja. Bagi pihak internal, laporan keuangan digunakan sebagai alat untuk mengendalikan dan mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasi. Sedangkan bagi pihak eksternal, laporan keuangan merupakan mekanisme pertanggungjawaban dan dasar untuk pengambilan keputusan. Oleh karena itu, laporan keuangan gereja harus mematuhi standar akuntansi yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang. Sebagai organisasi nirlaba, gereja harus mengikuti standar penyusunan laporan keuangan yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dalam PSAK 45 tentang pelaporan keuangan entitas nirlaba. Saat ini, pengurus gereja terdiri dari sekitar 25 orang, dengan mayoritas berusia lanjut. Meskipun gereja mengelola dana dalam jumlah yang cukup besar, namun belum memiliki sistem pembukuan dan pelaporan keuangan yang memadai. Maka dari itu, dibutuhkan peningkatan literasi keuangan di kalangan pengurus gereja agar transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan gereja dapat meningkat.

KAJIAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Bagian ini membahas penelaahan atas jurnal, artikel, buku dan sumber lain yang relevan. Jika diperlukan, perumusan hipotesis disajikan dalam bagian ini. Hipotesis yang dirumuskan harus didasari oleh logika yang memadai dan didukung oleh hasil penelitian terdahulu.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), literasi mencakup keterampilan menulis dan membaca, pengetahuan atau keahlian dalam suatu bidang atau aktivitas tertentu, serta kemampuan individu dalam memproses informasi dan pengetahuan untuk meningkatkan kehidupan sehari-hari. Secara umum tujuan literasi yaitu membantu meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kemampuan seseorang atau masyarakat dengan cara membaca berbagai informasi bermanfaat.

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (2016) literasi keuangan merujuk pada serangkaian proses atau aktivitas yang bertujuan meningkatkan pengetahuan, keyakinan, dan keterampilan finansial konsumen dan masyarakat secara umum,

sehingga mereka dapat mengelola keuangan dengan lebih efektif. Putri dan Henny (2017) juga menjelaskan bahwa literasi keuangan merupakan bagian integral dari pembelajaran tentang manajemen keuangan dan perencanaan investasi, yang bertujuan agar keputusan finansial sehari-hari dapat diambil dengan lebih terarah dan bijaksana. Selain itu, laporan The Master Card Foundation's (2011) menyatakan bahwa tingkat literasi keuangan yang rendah dapat mengakibatkan pengambilan keputusan finansial yang tidak produktif, seperti pengeluaran berlebihan, kurangnya tabungan, dan kehilangan peluang untuk berinvestasi.

Menurut PSAK nomor 45 (2011), organisasi nirlaba didefinisikan sebagai lembaga yang tidak berorientasi pada profit, yang mendapatkan sumber daya dan donasi dari anggota serta penyumbang lainnya tanpa tujuan imbalan finansial. Fredik (2016) menjelaskan bahwa organisasi nirlaba atau non-profit adalah entitas yang didirikan dengan tujuan mendukung suatu isu atau tujuan tertentu yang menarik perhatian publik, tanpa memperhatikan keuntungan finansial. Dengan demikian, dari konsep tersebut, dapat dinyatakan bahwa organisasi nirlaba adalah lembaga yang memiliki misi khusus dan beroperasi tanpa maksud memperoleh laba atau memanfaatkan sumbangan dana dari anggota atau pihak lainnya.

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2011), standar akuntansi keuangan adalah pedoman resmi yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang, yang mencakup prinsip-prinsip dan metode yang menjadi dasar umum dalam praktik akuntansi suatu perusahaan dalam lingkungan tertentu. Standar tersebut dapat diterapkan selama masih relevan dengan situasi perusahaan yang bersangkutan. Dewan Standar Akuntansi Keuangan, yang merupakan bagian dari Ikatan Akuntan Indonesia, bertanggung jawab atas penyusunan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Salah satu standar yang dikeluarkan oleh Dewan tersebut adalah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 45 (PSAK 45), yang merupakan standar khusus untuk pelaporan keuangan entitas nirlaba. PSAK 45 yang berlaku saat ini adalah revisi tahun 2011, yang sebelumnya adalah PSAK 45 edisi 1997 yang telah disetujui oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan. Standar ini diterbitkan dengan tujuan memberikan pedoman khusus bagi organisasi nirlaba dalam penyusunan laporan keuangannya. Berdasarkan PSAK No. 45 (2011), laporan keuangan organisasi nirlaba mencakup laporan posisi keuangan pada akhir periode pelaporan, laporan aktivitas, laporan arus kas untuk periode tersebut, serta catatan-catatan tambahan yang mendukung laporan keuangan.

Studi ini memeriksa hipotesis menggunakan Independent t-test apabila data terdistribusi normal, sedangkan Mann-Whitney Test digunakan untuk data yang tidak terdistribusi normal. Analisis dilakukan menggunakan perangkat lunak SPSS untuk menentukan signifikansi data yang diuji, dan dari situ, mengonfirmasi atau menolak

hipotesis yang diajukan. Rumusan hipotesisnya yaitu:

H1 : Literasi berpengaruh terhadap penerapan pelaporan keuangan organisasi nirlaba berdasarkan psak no. 45 di kota Tarakan.

METODE PENELITIAN

Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang diterapkan dalam penelitian ini adalah menggunakan kuesioner. Sugiyono (2013) menjelaskan bahwa kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang melibatkan penyampaian serangkaian pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden, yang kemudian dijawab dalam bentuk daftar pertanyaan atau angket elektronik. Sampel yang mencerminkan karakteristik yang diinginkan diminta untuk mengisi kuesioner yang berkaitan dengan topik penelitian.

Teknik Analisis Data

Studi ini mengadopsi metode kuantitatif dengan memanfaatkan data primer dalam bentuk kuesioner. Data yang diperoleh secara langsung akan diolah dalam analisis selanjutnya.

a. Evaluasi Alat Penelitian

Sebelum melanjutkan ke analisis data, dilaksanakan pengecekan validitas dan reliabilitas terlebih dahulu terhadap kuesioner yang telah didistribusikan dan diisi. Uji validitas bertujuan untuk menilai sejauh mana instrumen pengukuran mampu mengukur variabel yang dimaksud dengan tepat dan akurat. Sedangkan, uji reliabilitas dilakukan untuk mengevaluasi seberapa konsisten hasil pengukuran dari instrumen tersebut. Hasil pengukuran dikatakan reliabel apabila ketika diuji pada saat yang berbeda dengan kelompok subjek yang sama, hasilnya relatif sama, dengan catatan bahwa aspek yang diukur pada subjek tidak mengalami perubahan.

1) Uji Validitas

Uji validitas melibatkan evaluasi terhadap kemampuan alat pengukur yang telah dibuat untuk menentukan sejauh mana alat tersebut mampu mengukur variabel yang dimaksud dengan tepat. Tujuan dari uji validitas adalah untuk memastikan bahwa data yang diperoleh dari alat pengukur tersebut relevan dan sesuai dengan tujuan pengukuran yang telah ditetapkan. Pengujian validitas pada kuesioner dilakukan melalui penerapan metode korelasi pearson's product moment dengan dukungan perangkat lunak SPSS. Instrumen penelitian dianggap valid apabila nilai koefisien

korelasi yang dihasilkan $> 0,3$ (Sugiyono, 2010).

2) Uji Reliabilitas

Pengujian reliabilitas menekankan kemampuan instrumen pengukuran untuk menghasilkan hasil yang konsisten dalam pengukuran dari satu waktu ke waktu lainnya. Reliabilitas adalah indikator yang mengindikasikan seberapa dapat diandalkannya suatu alat pengukur atau instrumen (Singarimbun, 1989). Pengujian reliabilitas dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak SPSS dan hasilnya diekspresikan dalam bentuk koefisien Cronbach dengan menggunakan Alpha (α) 0,6. Instrumen penelitian dianggap reliabel jika nilai α yang diperoleh dari hasil uji lebih besar dari 0,6 (Ghozali, 2005).

b. Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk menentukan apakah data yang terkumpul dari penelitian mengikuti distribusi normal atau tidak. Prosedur pengujian normalitas data dilaksanakan memakai perangkat lunak SPSS. Penilaian apakah suatu dataset mengikuti distribusi normal bergantung pada kriteria berikut:

1. Jika nilai signifikansi (probabilitas) kurang dari 5%, data dianggap tidak berdistribusi secara normal.
2. Jika nilai signifikansi (probabilitas) lebih dari 5%, data dianggap memiliki distribusi normal.

Hasil penentuan apakah data berdistribusi normal atau tidak akan menentukan teknik statistik yang digunakan dalam pengujian hipotesis penelitian. Jika data terdistribusi secara normal, hipotesis penelitian akan diuji menggunakan independent t-test. Sebaliknya, jika hasil uji normalitas menunjukkan bahwa data tidak berdistribusi normal, maka akan digunakan uji Mann-Whitney Test.

c. Analisis Statistik Deskriptif (Uji Rata-rata)

Dalam penelitian ini, analisis statistik deskriptif digunakan untuk mengeksplorasi dan mengidentifikasi tingkat literasi pelaporan keuangan organisasi nirlaba di Kota Tarakan berdasarkan PSAK No. 45. Ukuran yang kemudian digunakan adalah nilai rata-rata (mean) dari setiap item jawaban. Penghitungan nilai rata-rata ini dilakukan dengan membagi total skor variabel dari setiap responden dengan jumlah skor ideal untuk variabel tersebut. Skor ideal mengacu pada nilai maksimum yang dapat dicapai jika semua responden memilih pilihan jawaban dengan skor tertinggi untuk semua pertanyaan dalam kuesioner. Perhitungan nilai rata-rata tersebut adalah sebagai berikut:

$$\bar{X} = \sum_{i=1}^n \frac{X_i}{n} \dots\dots\dots 1$$

(Indriantoro dan Supomo, 2003:173)

Keterangan:

\bar{X} = rata-rata/mean

Σ = jumlah

X_i = nilai x responden ke-i, i dari 1 sampai ke-n

n = total skor ideal

Hasil perhitungan rata-rata jawaban untuk setiap variabel selanjutnya dibandingkan dengan kriteria yang telah ditetapkan untuk setiap item jawaban dalam kuesioner. Untuk menetapkan kriteria tersebut, langkah awalnya adalah menentukan interval skor rata-rata untuk setiap variabel secara keseluruhan dengan mencari rentang data seperti berikut:

$$\text{Rentang data} = \text{Data Tertinggi} - \text{Data Terendah}$$

Sedangkan penentuan panjang kelas intervalnya dirumuskan dengan:

$$\text{Panjang Kelas Interval} = \frac{\text{Rentang Data}}{\text{Panjang Kelas}}$$

Dengan menerapkan skala Likert, skor tertinggi yaitu 5 memiliki nilai 100%, sementara skor terendah yaitu 1 memiliki nilai 20%. Pendekatan skor ini mengarah pada perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Panjang Kelas Interval} = \frac{100\% - 20\%}{5} = 16\%$$

Kemudian, kriteria untuk evaluasi variabel persepsi terkait penerapan PSAK 45 ditetapkan. Kriteria ini diadaptasi dari Karengga (2001) dengan beberapa penyesuaian sesuai dengan kebutuhan penelitian. Rincian kriteria tersebut kemudian disajikan dalam Tabel 1 sebagai berikut:

Tabel 1
Kriteria Literasi

Kriteria Variabel Persepsi	Interval
Sangat Tidak Setuju	20% – 36%
Tidak Setuju	>36% – 52%
Kurang Setuju	>52% – 68%

Setuju	>68% – 84%
Sangat Setuju	>84% – 100%

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Analisis Statistik Deskriptif

a. Penerapan PSAK 45

Tabel 2 di bawah ini memperlihatkan rangkuman tanggapan dari responden terhadap tiga indikator terkait dengan variabel penelitian, yaitu kepatuhan penerapan pernyataan standar akuntansi keuangan nomor 45. Indikator tersebut mencakup prinsip pengakuan, prinsip pengungkapan, dan prinsip penyajian dalam sebuah laporan keuangan. Setiap tabel menggambarkan tanggapan dari setiap subjek penelitian dalam kelompok responden, yakni yang menyusun laporan keuangan gereja di kota Tarakan.

Tabel 2
Jawaban Responden Gereja Kota Tarakan
Kuesioner Kepatuhan Penerapan PSAK 45

No. Item Pertanyaan	Pilihan Jawaban											
	Selalu		Sering		Kadang-kadang		Hampir Tidak Pernah		Tidak Pernah		Total	
	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%
1 Indikator I	12	63,16	0	0,00	3	15,79	4	21,05	0	0,00	19	100,00
2 Indikator II	2	50,00	0	0,00	2	50,00	0	0,00	0	0,00	4	100,00
3 Indikator III	1	14,28	2	28,58	1	14,28	1	14,28	2	28,58	7	100,00

Sumber : Nainggolan, 2023

Berdasarkan informasi dalam Tabel 2, terkait dengan indikator Prinsip Pengakuan, terlihat bahwa Gereja di Kota Tarakan secara konsisten mencatat beberapa akun (63,16%) yang merupakan bagian dari elemen-elemen laporan keuangan, misalnya aktiva bersih tidak terikat, pendapatan dari kegiatan operasional, keuntungan operasional, keuntungan non operasional, kerugian operasional, kerugian non operasional, kas dari aktivitas operasi, kas dari pendapatan kegiatan, dan kas dari sumbangan. Meskipun demikian, organisasi tidak selalu konsisten dalam mencatat kas dari piutang, hutang lain-lain yang dilunasi, dan penerimaan kas dari penjualan aktiva non persediaan.

Untuk indikator kedua, terlihat jika organisasi telah berhasil dalam mengungkapkan informasi tambahan secara rinci, seperti rincian sumber daya dan kewajiban yang tidak tercantum dalam bagian utama laporan keuangan, serta informasi penting lainnya yang diperlukan oleh pemakai laporan keuangan untuk pengambilan keputusan. Namun, terdapat ketidak-konsistenan dalam pengungkapan informasi tambahan mengenai dasar kebijakan akuntansi yang dipakai dalam penyusunan laporan keuangan, serta informasi tentang likuiditas aktiva atau jatuh tempo kewajiban, termasuk pembatasan penggunaan aktiva, dalam catatan atas laporan keuangan.

Terhadap indikator prinsip penyajian, terungkap bahwa organisasi tidak pernah mengelompokkan aktiva menjadi lancar dan tidak lancar, atau mengelompokkan

kewajiban menjadi jangka pendek dan panjang. Selain itu, total pendapatan dan beban disajikan secara bruto. Organisasi menampilkan pendapatan, kerugian dan sumbangan sebagai penambah pada aktiva bersih tidak terikat, dan juga menampilkan total pendapatan dan beban bruto.

b. Literasi Penyusun Laporan Keuangan terhadap Penerapan PSAK 45

Tabel 3 memuat skor kategori persepsi yang diperoleh oleh kelompok penyusun laporan keuangan terkait tiga indikator persepsi terhadap penerapan PSAK 45. Untuk indikator pengetahuan tentang PSAK No. 45, skor mencapai 52,4% atau dikategorikan sebagai Kurang Setuju. Hal ini memperlihatkan bahwa pengetahuan dan pemahaman penyusun laporan keuangan terkait keberadaan PSAK NO. 45 sebagai standar pelaporan keuangan untuk organisasi nirlaba non pemerintah masih rendah. Begitu juga dengan indikator pandangan terkait legalitas PSAK No. 45 yang mendapat kategori kurang setuju dengan skor 67,3%. Hal ini menggambarkan tingkat kesadaran yang masih rendah dari para penyusun laporan keuangan terhadap keabsahan hukum yang dimiliki oleh standar pelaporan keuangan tersebut.

Persepsi yang kurang menguntungkan terhadap kedua indikator tersebut mungkin disebabkan oleh praktik penyusunan laporan keuangan di Gereja Kota Tarakan yang masih mengikuti Standar Operasional Prosedur (SOP) keuangan yang ditetapkan oleh Gereja Pusat. Faktor sumber daya manusia juga mungkin menjadi faktor penyebabnya. 40 % dari penyusun laporan keuangan memiliki latar belakang pendidikan hanya sampai tingkat sekolah menengah atas. Data demografis juga mengungkapkan bahwa lebih dari setengah jumlah responden di kelompok penyusun laporan keuangan tidak pernah mengikuti pelatihan resmi di bidang keuangan (66,67%) dan kurang memiliki pemahaman keuangan yang berbasis pada Akuntansi (56,67%).

Persepsi yang lebih menguntungkan terkait indikator pendapat mengenai penerapan PSAK No. 45 di gereja yang ada di kota Tarakan. Dengan perolehan skor kategori sebesar 74,6%, pandangan para penyusun laporan keuangan terhadap indikator tersebut dapat diklasifikasikan sebagai Setuju (lihat Tabel 3). Ini memperlihatkan bahwa responden dari kelompok penyusun laporan keuangan akan merespons dengan baik jika suatu kebijakan diterapkan untuk menerapkan pernyataan standar akuntansi keuangan No. 45 dalam penyusunan laporan keuangan di organisasi tersebut.

Tabel 3
Persepsi Penyusun Laporan Keuangan
Indikator Pengetahuan Tentang PSAK 45

No.	Variabel/Indikator	Skor Jawaban					Total	Skor Ideal	Interval Persepsi	Kategori Persepsi
		5	4	3	2	1				
1. Variabel Persepsi	Frekuensi	120	32	27	0	49	228	2250	0,657	Kurang Setuju
	Total Skor	600	128	81	0	49	858			
2. Indikator I	Frekuensi	5	41	30	40	34	150	750	0,524	Kurang Setuju
	Total Skor	25	164	90	80	34	393			
3. Indikator II	Frekuensi	5	42	27	13	3	90	450	0,673	Kurang Setuju
	Total Skor	25	168	81	26	3	303			
4. Indikator II	Frekuensi	8	144	51	7	0	210	1050	0,746	Setuju
	Total Skor	40	576	153	14	0	783			

Sumber : Nainggolan, 2023

Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa para penyusun laporan dari organisasi nirlaba di Kota Tarakan memiliki pandangan yang kurang mendukung terhadap penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 45. Hal ini tercermin dari rentang skor yang didapat untuk variabel persepsi penerapan PSAK No. 45, yang mencapai 65,7% dan termasuk kedalam kategori Kurang Setuju.

SIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan analisis data dan diskusi, disimpulkan bahwa organisasi nirlaba di kota Tarakan dapat dianggap telah mematuhi kriteria kepatuhan yang ditetapkan dalam penelitian ini. Namun penyusun laporan keuangan dari organisasi tersebut menunjukkan persepsi yang kurang mendukung atau kurang setuju terhadap penerapan pernyataan standar akuntansi keuangan nomor 45 (PSAK No. 45).

Saran

Ikatan Akuntan Indonesia sebagai lembaga yang mengembangkan standar pelaporan keuangan di Indonesia, perlu meningkatkan sosialisasi dan edukasi mengenai penerapan PSAK 45. Mereka juga bisa bekerjasama dengan Palang Merah Indonesia untuk mencari solusi terhadap masalah dualisme dalam pelaporan keuangan. Kemungkinan akan diperlukan penyesuaian pada ketentuan-ketentuan PSAK 45 agar dapat memperhitungkan kepentingan berbagai pihak yang terlibat.

DAFTAR PUSTAKA

- Aritonang dan De Jonge. 2009. Apa dan bagaimana Gereja? Pengantar Sejarah Eklesiologi. PT. BPK Gunung Mulia, Jakarta.
- Azwari, P. C. (2018). Rekonstruksi Perlakuan Akuntansi Untuk Entitas Tempat Ibadah (Studi Perlakuan Akuntansi Organisasi Masjid Berdasarkan PSAK 45 Dan PSAK 109). *I-Finance: A Research Journal on Islamic Finance*. <https://doi.org/10.19109/ifinance.v4i1.2304>.
- Bastian, Indra. (2006). Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar. Jakarta: Erlangga
- Cintokowati, 2010. ASP: Akuntansi Masjid Vs Gereja. Wordpress. Jakarta. <http://cintokowati.wordpress.com/2010/11/14/asp-akuntansi-masjid-vs-gereja/>.
- Halim, Abdul. 2013. Akuntansi Sektor Publik. Salemba Empat.
- Hery. 2016. Akuntansi Dasar 1 & 2. Jakarta: PT Grasindo.
- Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI). 2011. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 45 Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba. PSAK. Jakarta: Salemba 4.
- Janis, R. S., & Budiarmo, N. S. (2017). Analisis penerapan psak no. 45 tentang pelaporan keuangan entitas nirlaba pada jemaat gmist pniel biau kab, kep. Sitiro. *Accountability*. <https://doi.org/10.32400/ja.16032.6.1.2017.103-111>
- Jlagran. 2012. Gereja Lokal. Wordpress. Yogyakarta. <http://imankekristenan.wordpress.com/category/doktrin-gereja/>.
- Nazila, S. R., & Fahlevi, H. (2019). Analisis Penerapan Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba Berdasarkan PSAK No. 45 Pada Masjid Di Kota Banda. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*. <https://doi.org/10.24815/jimeka.v4i2.12278>
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. (2016). Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan Bagi Konsumen dan/atau Masyarakat. *Journal of Chemical Information and Modeling*. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>.
- Ikatan Akuntansi Indonesia. Revisi 2011. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 45 Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba. PSAK. Jakarta: Salemba 4.
- Rahayu, Ruci Arizanda. Ludigdo, Unti dan Achsin, 2017. M. Transparency and Accountability of Financial Report at Surabaya Al Akbar National Mosque. *Research Journal of Finance and Accounting* Vol.8, No.18, 2017
- Randa, F. (2011). Akuntabilitas Keuangan Dalam Organisasi Keagamaan (Studi Etnografi Pada Gereja Katolik Di Tana Toraja). *Jurnal Sistem Informasi Manajemen Dan Akuntansi*.
- Rasuma Putri, N. M. D., & Rahyuda, H. (2017). Pengaruh Tingkat Financial Literacy Dan Faktor Sosiodemografi Terhadap Perilaku Keputusan Investasi Individu. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*. <https://doi.org/10.24843/eeb.2017.v06.i09.p09>
- Raya, M. K. G. (2017). Evaluasi Implementasi Pelaporan Keuangan Sebagai Bentuk Akuntabilitas Organisasi Keagamaan (Studi Kasus: Gereja Katolik Paroki St. Paulus Miki Salatiga). In *Journal of Accounting & Management Innovation*.
- Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D Sugiyono. 2013. "Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif,

Kualitatif, dan R&D.” Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. <https://doi.org/10.1007/s13398-014-0173-7.2>

Sugiyono. (2014). Teknik Pengumpulan Data. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. <https://doi.org/10.3354/dao02420>

The Master Card Foundation. 2011. *Financial Education Initiatives for the Poor*. <http://www.mastercardfdn.org/pdfs/TakingStockFinancial.pdf>.